

MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL

Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan



MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan

Suryanto, dkk.

MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL
Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan

**Buku ini diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan IRSA ke-14
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
dan didanai oleh Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

UNS PRESS

**Menumbuhkan Ekonomi Lokal
(Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan)**
Hak Cipta©Suryanto, dkk. 2018

Penulis

Suryanto
Tulus Tambunan
M. Yusuf Indra Purnama
Rochmat Aldy Purnomo
Nurul Istiqomah
Izza Mafruhah
Adenantha L. Dewa
Lukman Hakim
Bhimo Rizky Samudro
Dinarjati Eka Puspitasari
Yogi Pasca Pratama
Akhmad Daerobi
Hermada Dekiawan
Mulyanto
Yunastiti Purwaningsih

Sutomo
Agung Slamet Sukardi
Dowes Ardi Nugroho
Fitria Nur Rahmawati
Dwi Prasetyani
Khusnul Ashar
Susilo
Mutifiah
Tri Mulyaningsih
Fatimah
Wahyu Prasetyo Widodo
Malik Cahyadin
Ida Busnety
Johadi

Editor

Suryanto
Tulus Tambunan

Ilustrasi Sampul

UNS Press

Penerbit dan Percetakan

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)
Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
57126
Telepon (0271) 646994 Psw. 341 Fax. (0271) 7890628
Website : www.unspress.uns.ac.id
Email : unspress@uns.ac.id

Cetakan 1, Edisi I, Juni 2018
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

ISBN 978-602-397-178-7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga buku bunga rampai ini terselesaikan dapat diterbitkan. Buku bunga rampai ini adalah kumpulan dari tulisan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Brawijaya, dan praktisi.

Ekonomi lokal adalah ekonomi yang tumbuh berdasarkan kekuatan dan keunikan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi lokal menurut Bank Dunia adalah upaya untuk mengembangkan usaha bisnis melalui pengoptimalan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas (*clustering*), tata ruang, dan regionalisasi ekonomi.

Menumbuhkan ekonomi lokal tidak dapat berharap seperti tumbuhnya cendawan di musim hujan, karena tumbuhnya ekonomi lokal tidak mengenal musim tertentu. Ekonomi lokal tumbuh karena proses yang lebih lama dan kekuatan ekonomi lokal adalah kekhasan yang dimiliki. Ide membuat bunga rampai ini adalah karena tumbuhnya ekonomi lokal memiliki variasi yang unik (khas) seperti meneguhkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, dan keunikan setiap daerah.

Harapannya buku bunga rampai ini dapat menjadi sarana saling tukar pandangan dan semoga menjadi secuil inspirasi untuk para akademisi dan praktisi. Inspirasi untuk dapat membantu pengembangan dan penguatan ekonomi lokal di daerah-daerah lain di Indonesia.

Akhirnya, buku bunga rampai ini tidak dapat terselesaikan apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Prodi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS atas segala fasilitas yang diberikan. Kedua, para kontributor tulisan yang menjadikan buku bunga rampai ini menjadi lebih berwarna. Ketiga, kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga bantuannya tercatat sebagai amal baik. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam buku bunga rampai ini saya selaku editor mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Juni 2018

Suryanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAGIAN I PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN Suryanto, Tulus Tambunan.....	1
BAGIAN II EKONOMI KREATIF	
BAB II Ekonomi Kreatif Sumber Perkembangan Ekonomi Desa Tulus Tambunan	9
BAB III <i>Smart Economy</i> untuk Penguatan Ekonomi Lokal Kota Surakarta M. Yusuf Indra Purnama, Suryanto	45
BAB IV Seni Reyog Ponorogo dalam Perspektif Strategi Pelestarian dan Pengembangan Industri Kreatif Rochmat Aldy Purnomo, Suryanto	61
BAB V Konsep <i>Blue Economy</i> dalam Mewujudkan Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Biogas Nurul Istiqomah, Izza Mafruhah.....	75
BAB VI Peran Transportasi Laut pada Poros Maritim dalam Pengurangan Disparitas Antarwilayah di Indonesia Adenantha L. Dewa, Izza Mafruhah, Indah Susilowati	93
BAGIAN III KELEMBAGAAN	
BAB VII Praktik-praktik Terbiak Pengelolaan Ekonomi Lokal di Subosuka Wonosraten Lukman Hakim	105
BAB VIII Kearifan Lokal dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekonomi Politik dan Redulasi: Studi Kasus Tradisi Sasi di Maluku Bhimo Rizky S., Dinarhati Eka P., Yogi Pasca P.	113
BAB IX Strategi Penguatan Kelembagaan Usahatani Akhdad Daerobi.....	123
BAB X Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Surakarta Suryanto, Hermada Dekiawan, Johadi.....	133

BAB XI	Kinerja Keuangan dan Tren Pendapatan Daerah dari Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Mulyanto, Lukman Hakim.....	155
BAB XII	Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Relokasi Industri dan kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Yunastiti Purwaningsih, Sutomo	183

BAGIAN III KEWIRAUSAHAAN

BAB XIII	Potensi Wisata Kuliner terhadap Penguatan Ekonomi Lokal Agung Slamet S., Doves Ardi N., Fitria Nur R.....	209
BAB XIV	Peran dan Perilaku Muslimah Pengusaha dalam Dinamika Kewirausahaan Dwi Prasetyani, Khusnul Ashar, Susilo, Multifiah.....	227
BAB XV	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Akses Kredit dan Pendampingan Usaha Tri Mulyaningsih, Fatimah	251
BAB XVI	Analisis Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Pengangguran pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016 Wahyu Prasetyo Widodo, Malik Cahyadin.....	269
BAB XVII	Pemetaan Produk-produk Unggulan di Provinsi Sumatera Barat: Hasil Sebuah Tinjauan Ulang dari Berbagai Sumber Tulus Tambunan, Ida Busteny	289

BAB XI

KINERJA KEUANGAN DAN TREN PENDAPATAN DAERAH DARI POS PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

**Mulyanto
Lukman Hakim**

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya dari komponen Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015 sekaligus untuk melihat trend /hasil proyeksinya selama tahun 2016-2020.

Untuk mengukur kinerja Pajak, digunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: (i) Rasio Pengumpulan Pajak Daerah, (ii) Kontribusi Pajak Daerah, (iii) Pertumbuhan Pajak Daerah, dan (iv) Matrik Potensi Pajak Daerah. Keempat model tersebut dianalisis berdasar perkembangan target dan realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015. Sementara untuk membuat ramalan/proyeksi besarnya Pajak Daerah untuk kurun waktu 2016-2020 digunakan pendekatan *trend* dengan metode reresi OLS (*Ordinary Least Square*).

Dari hasil studi ditemukan bahwa dibanding nilai targetnya, nilai realisasi capaian Pajak Daerah dan pos-pos pembentuknya selalu di atas targetnya. Target Pajak Daerah yang pada tahun 2013 sebesar Rp.51,18 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp.76,91 miliar. Pada tahun 2015, target pajak yang besarnya mencapai Rp.70,91 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp 177,40 miliar. Pos-pos dalam Pajak Daerah yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap perolehan Pajak Daerah

adalah: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pos Pajak Daerah yang mengalami peningkatan pertumbuhan ada 3 (tiga) yaitu: (i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Hiburan, dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dari sisi Matrik Potensi, pos Pajak Daerah yang menempati status **Prima**, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); dan (iii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Pengukuran prestasi kerja dalam penerimaan Pajak Daerah masih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), dan bukan dari rasio cakupan (*coverage ratio*), yang merupakan rasio dari realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi yang benar-benar ada dan dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar.

Hasil kajian ini, diharapkan bisa dikembangkan ke jenis pos Retribusi Daerah dan juga pos-pos yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis retribusi dan juga pos-pos lain yang termasuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Kabupaten Karanganyar

JEL Classification: r12, r5

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal pada era Reformasi secara resmi telah dimulai sejak 1 Januari 2001, yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Kedua regulasi tersebut sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah. Selain asas desentralisasi kedua UU tersebut juga mengatur tentang azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan

antar daerah dengan daerah lainnya. Berdasar pada konteks ini, maka implementasi otonomi daerah harus mampu memberikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan kemandirian daerah dengan menggali potensi pendapatan daerahnya sendiri terutama sumber-sumber pendapatan lokal yang tercantum dalam pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kaputra, 2013: 66-7).

Dalam hal kemandirian keuangan daerah, maka analisis terhadap kinerja keuangan daerah di Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta telah memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan dalam pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang telah dan akan terjadi.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "*self supporting*" dalam bidang keuangan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Soloraya yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, industri dan pariwisata dan mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi. Selain itu juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 dan tahun 2015 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga dapat disimpulkan terdapat pencatatan dan pengungkapan data-data keuangan yang sudah sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang ada.

Gambaran perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010-2014 dapat

dilihat pada Tabel 11.1 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, perolehan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.1 berikut.

Tabel 11.1
Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2014
(dalam Rp dan persen)

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	23.588.206.084	80.483.855.648	29,3
2011	40.731.984.055	104.080.774.286	39,1
2012	45.658.231.047	116.706.893.419	39,1
2013	77.015.249.349	161.724.333.711	47,6
2014	79.986.748.082	187.719.041.754	42,6

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

Berdasarkan Tabel 11.1 dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 39,6%. Pada tahun 2010 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 29,3% dengan nilai Rp.23,59 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya mencapai Rp. 80,48 miliar. Pada Tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah naik menjadi 47,6% dengan nilai sebesar Rp.77,02 miliar dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 161,72 miliar.

Di lain pihak, perkembangan realisasi pendapatan dari pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pasang surut. Pada setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Daerah paling besar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.25,49 miliar dari target Pajak Daerah sebesar Rp 51,53 miliar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010-2014 (dalam Rp dan persen)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	22.204.999.000	23.588.206.084	1.383.207.084	106,23
2011	28.849.400.000	40.731.984.055	11.882.584.055	141,19
2012	32.566.730.000	45.658.231.047	13.091.501.047	140,20
2013	51.528.299.000	77.015.249.349	25.486.950.349	149,46
2014	61.995.000.000	79.986.748.082	17.991.748.082	129,02

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan di atas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya dari komponen Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015 sekaligus untuk melihat trend /hasil proyeksinya selama tahun 2016-2020

B. METODE PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan dalam studi ini, khususnya yang terkait dengan alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Model Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*)

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi Rasio Pengumpulan (*collection ratio*) dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Rumus secara matematisnya adalah sebagai berikut:

$$RPP_{xi} = \frac{Realisasi_{Xi}}{Target_{Xi}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.1)$$

Di mana:

RPP : Rasio Pengumpulan Pungutan dari berbagai Jenis Pajak Daerah

Xi : Komponen dari Jenis Pajak Daerah.

2. Model Kontribusi

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi tingkat sumbangan/kontribusinya terhadap total Pajak Daerah, dirumuskan sebagai berikut:

$$PSP_{xi} = \frac{X_i}{X_{total}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.2)$$

Di mana:

PSP : Potensi Sumbangan dari berbagai jenis Pajak Daerah.

X_i : Komponen dari Jenis Pajak Daerah.

3. Model Pertumbuhan

Untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi pertumbuhan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RP_{xit} = \frac{X_{it} - X_{it-1}}{X_{it-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.3)$$

Di mana:

RPP : Rasio Potensi Pungutan dari berbagai Jenis Pajak Daerah.

X_{it} : Komponen dari Jenis Pajak Daerah tahun t.

X_{it-1} : Komponen dari Jenis Pajak Daerah tahun t-1.

4. Model Matrik Potensi

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi penggolongan masing-masing jenis Pajak Daerah, apakah termasuk dalam kategori Prima, Potensial, Berkembang atau Terbelakang, dapat dihitung dalam suatu Matrik Potensi kinerja Pajak seperti pada tabel berikut.

Pertumbuhan	Proporsi $\frac{\Delta Xi}{Rata - Rata X} > 1$	$\frac{\Delta Xi}{rata - rata X} < 1$
$\frac{\Delta Xi}{\Delta X_{total}} > 1$	<i>Prima</i>	<i>Berkembang</i>
$\frac{\Delta Xi}{\Delta X_{total}} < 1$	<i>Potensial</i>	<i>Terbelakang</i>

Catatan:

X_i : Retribusi Daerah (Retribusi Parkir diTepi Jalan Umum)

X : Jumlah Total Jenis Retribusi Daerah.

Δ : Pertumbuhan ($\Delta X_i = [(X_{it} - X_{it-1}) / X_{it-1}] \times 100\%$)

5. Analisis Trend

Analisis *trend* yang digunakan dalam studi ini, menggunakan pendekatan regresi tunggal/ sederhama dengan variabel terikatnya (*dependent variable*) adalah komponen Pajak Daerah, dan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah waktu. Secara matematisnya dirumsukan sebagai berikut:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \dots\dots\dots (2.4)$$

Di mana:

Y_i : Jenis Pajak Daerah.

X_i : variabel waktu (2013=1; 2014=2; dan 2015=3)

b_0 : Konstanta

b_1 : intersep / *sloope* / kemiringan

e_i : Kesalahan pengganggu

Proyeksi untuk tahun 2016 – 2020 menggunakan persamaan hasil regresi trend, dengan indeks proyeksi untuk tahun sebesar 3.2 (tahun 2016); sebesar 3.4 (tahun 2017); sebesar 3.6 (tahun 2018); sebesar 3.8 (tahun 2019); dan sebesar 4.0 (tahun 2020). Hasil proyeksi ini masuk kategori optimis. Sedang untuk proyeksi moderat, hasil proyeksi dikalikan pertumbuhan -0.01 (1%); dan pesimis dikalikan pertumbuhan -0.05 (5%).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pajak Daerah

Dari Tabel 11.3 dapat dilihat bahwa dibanding nilai targetnya, nilai realisasi capaian Pajak Daerah dan pos-pos pembentuknya selalu di atas targetnya. Target Pajak Daerah yang pada tahun 2013 sebesar Rp 51,18 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp 76,91 miliar. Nilai realisasi sebesar ini, sekali lagi merupakan akumulasi nilai realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Sementara pada tahun 2015, target pajak yang besarnya mencapai Rp 70,91 miliar, nilai realisasinya mencapai Rp 177,40 miliar. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dan diamati pada Tabel 11.3.

Tabel 11.3
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam Rp Ribu)

NO.	JENIS PAJAK	2013		2014		2015	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Hotel	825,000	1,037,119	855,000	1,969,948	1,057,965	2,618,378
02.	Restoran	475,000	1,311,410	540,000	2,628,017	1,127,821	3,849,458
03.	Hiburan	110,000	288,936	150,000	432,278	304,289	726,161
04.	Reklame	375,761	580,239	420,000	1,000,399	438,104	1,192,064
05.	PPJU	25,226,000	34,795,344	27,650,000	69,696,169	35,000,000	89,015,956
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	110,000	290,802	125,000	159,954	8,000	30,774
07.	Parkir	55,000	136,305	80,000	256,882	69,297	269,115
08.	Pajak Air Tanah	750,000	961,399	775,000	1,809,768	902,438	1,960,166
09.	BPHTB	7,250,000	14,817,812	7,250,000	21,917,409	11,000,000	31,328,842
10.	PBB	16,000,000	22,685,550	17,150,000	41,276,547	21,000,000	46,407,030
	Pajak Daerah	51,176,761	76,904,916	54,995,000	117,020,824	70,907,914	177,397,942

Catatan: Angka realisasi merupakan hasil penjumlahan akumulasi capaian bulanan, dari bulan Januari-Desember selama kurun waktu 2013-2015. Angka ini kemungkinan akan berbeda dengan laporan yang dibuat oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar, karena sudah merupakan nilai bersih (dikurangi upah/biaya pungut dari masing-masing pos Pajak Daerah).

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

2. Rasio Pengumpulan Pajak Daerah (Cr: *Collection Ratio*)

Hasil perhitungan potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) yang dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dengan Target pada tahun 2013-2015 menunjukkan angka yang relatif besar. Gambaran hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.4
Besaran Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*)
Pos-Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 (dalam persen)

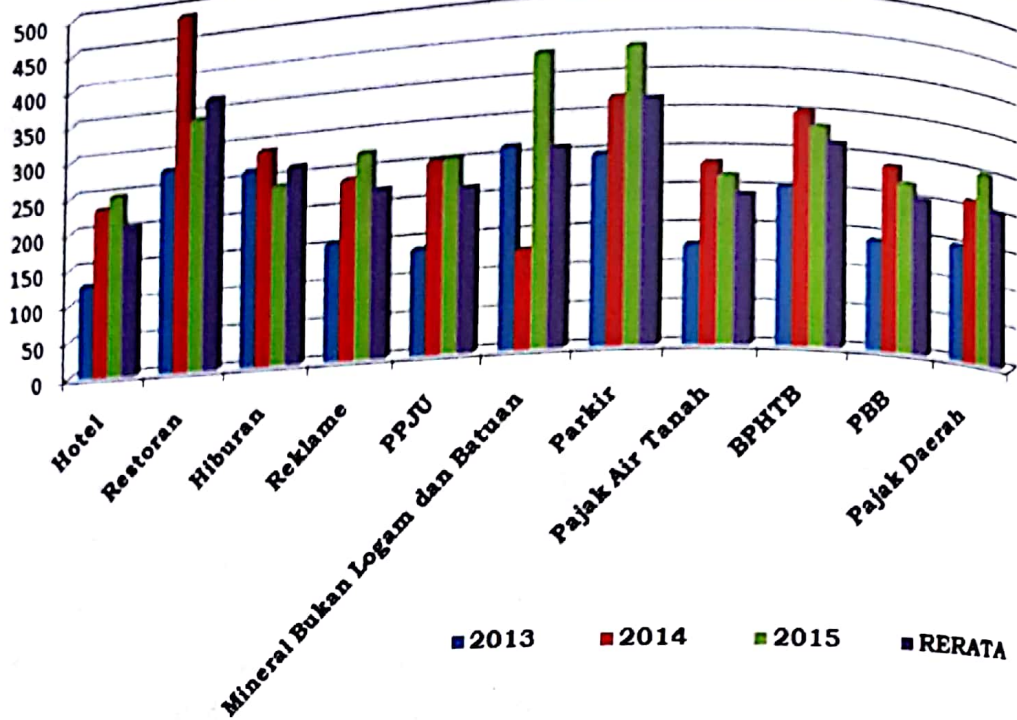
No.	JENIS PAJAK	2013	2014	2015	RERATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Hotel	125.71	230.40	247.49	201.20
02.	Restoran	276.09	486.67	341.32	368.02
03.	Hiburan	262.67	288.19	238.64	263.17
04.	Reklame	154.42	238.19	272.10	221.57
05.	PPJU	137.93	252.07	254.33	214.78
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	264.37	127.96	384.67	259.00
07.	Parkir	247.83	321.10	388.35	319.09
08.	Pajak Air Tanah	128.19	233.52	217.21	192.97
09.	BPHTB	204.38	302.31	284.81	263.83
10.	PBB	141.78	240.68	220.99	201.15
	Pajak Daerah	150.27	212.78	250.18	204.41

Catatan: Angka realisasi merupakan hasil penjumlahan akumulasi capaian pos-pos Pajak Daerah secara bulanan, dari bulan Januari-Desember pada tahun yang bersangkutan.

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2013-2015, besaran Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) dari pos-pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar yang relatif tinggi adalah Pajak Restoran, dengan rerata sebesar 368,02% selama kurun waktu tersebut. Capaian CR yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 486,67%.

Sementara itu, besaran CR dari pos-pos Pajak Daerah yang relatif rendah adalah Pajak Air Tanah, dengan rerata sebesar 192,97% selama kurun waktu 2013-2015; namun capaian CR yang paling rendah pada Pajak Hotel pada tahun 2013, yaitu sebesar 125,71%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.5 dan juga Gambar 11.1 berikut.



Gambar 11.1
Grafis Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*)
dari Pos-Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 (dalam persen)
Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 4.2.

3. Kontribusi Pajak Daerah

Potensi pungutan dari berbagai jenis pos Pajak Daerah yang dilihat dari sisi sumbangan/kontribusinya terhadap total Pajak Daerah, dihitung dengan cara membandingkan nilai dari setiap jenis Pajak Daerah terhadap total Pajak Daerah. Gambaran hasil perhitungan nilai kontribusi berbagai jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.5.

Dari Tabel 11.5 dapat dilihat bahwa secara umum ada 3 (tiga) besar jenis pos Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar ke Pajak Daerah, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) di mana secara rata-rata selama tahun 2013-2015 memberikan kontribusi sebesar 51,66% atau hampir separuh dari total Pajak Daerah; (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 30,31%; dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) secara rata-rata memberikan sumbangan sebesar 18,55%.

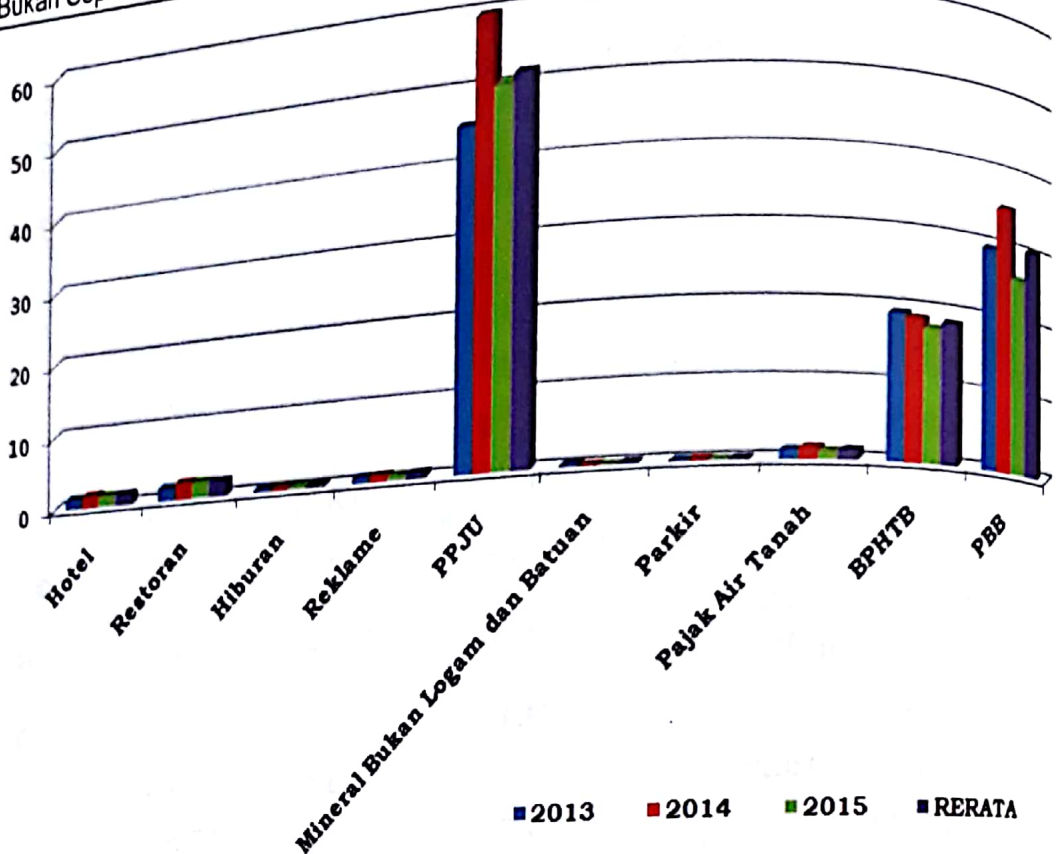
Tabel 11.5
Perkembangan Nilai Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 (dalam persen)

No.	JENIS PAJAK	2013	2014	2015	RERATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Hotel	1.35	1.68	1.48	1.50
02.	Restoran	1.71	2.25	2.17	2.04
03.	Hiburan	0.38	0.37	0.41	0.38
04.	Reklame	0.75	0.85	0.67	0.76
05.	PPJU	45.24	59.56	50.18	51.66
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.38	0.14	0.02	0.18
07.	Parkir	0.18	0.22	0.15	0.18
08.	Pajak Air Tanah	1.25	1.55	1.10	1.30
09.	BPHTB	19.27	18.73	17.66	18.55
10.	PBB	29.50	35.27	26.16	30.31
	Pajak Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pos-pos Pajak Daerah selain ketiga pos yang telah disebutkan di atas (PPJU, PBB dan BPHTB) memberikan kontribusi yang relatif rendah, yaitu kurang dari 5%; bahkan ada 2 (dua) pos Pajak Daerah yang memberikan sumbangan kurang dari 1%; yaitu: (i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan (ii) Pajak Parkir. Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013-2015, sehingga terus mengalami pertumbuhan yang negatif.

Dari Tabel 11.5 juga dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2013-2015 tidak ada satupun jenis Pajak Daerah yang mengalami kenaikan kontribusi yang kecenderungan / trennya semakin meningkat, tetapi naik turun selama kurun waktu tersebut. Selain Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jenis pajak yang kontribusinya semakin menurun adalah Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yaitu dari sebesar 19,27% pada tahun 2013; turun menjadi sebesar 18,73% pada tahun 2014; serta turun lagi menjadi sekitar 17,66% pada tahun 2015. Gambaran hasil perhitungan nilai kontribusi berbagai jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar secara grafis, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.6.



Gambar 11.2

Grafis Perkembangan Nilai Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 (dalam persen)

Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 4.3.

4. Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan dari berbagai jenis pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar dihitung dengan membandingkan besaran realisasi setiap jenis pos Pajak Daerah pada tahun berjalan dengan kondisi 1 (satu) tahun sebelumnya. Gambaran hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pos-pos Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.6

Dari Tabel 11.6 dapat dilihat bahwa rerata pertumbuhan yang paling tinggi adalah pos Pajak Restoran, dengan tingkat pertumbuhan mencapai hingga 104%. Pertumbuhan Pajak Restoran yang tinggi dicapai pada tahun 2015, yaitu sebesar 108,86%. Di lain pihak, untuk pos Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tingkat pertumbuhannya terus menurun dari sebesar -45,00% pada tahun 2014, menurun lagi menjadi sebesar -93,60% pada tahun 2015; sehingga secara rerata mempunyai pertumbuhan yang negatif sebesar -69,30%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

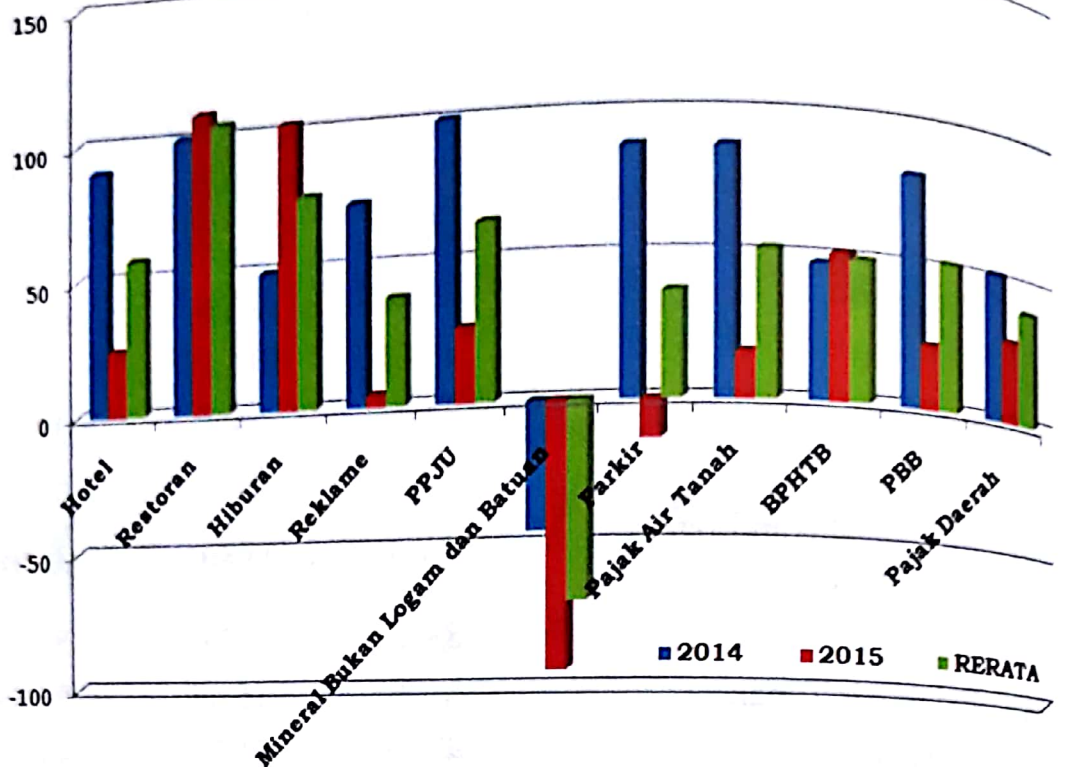
Tabel 11.6
Pertumbuhan Berbagai Jenis Pos Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 (dalam persen)

No.	JENIS PAJAK	2014	2015	RERATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Hotel	89.94	23.74	56.84
02.	Restoran	100.40	108.86	104.63
03.	Hiburan	49.61	102.86	76.23
04.	Reklame	72.41	4.31	38.36
05.	PPJU	100.30	26.58	63.44
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	(45.00)	(93.60)	(69.30)
07.	Parkir	88.46	(13.38)	37.54
08.	Pajak Air Tanah	88.24	16.44	52.34
09.	BPHTB	47.91	51.72	49.82
10.	PBB	81.95	22.45	52.20
Pajak Daerah		52.16	28.94	40.55

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari Tabel 11.6 juga dapat dilihat bahwa selama tahun 2014-2015 yang mempunyai daya tumbuh meningkat, selain pos Pajak Restoran adalah Pajak Hiburan dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Secara keseluruhan pertumbuhan untuk pos Pajak Daerah pada tahun 2015 (sebesar 28,94%) lebih rendah dibanding dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 (sebesar 52,16%). Sementara itu, untuk pos Pajak Parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2015, yaitu sebesar -13,38%; dibanding dengan tahun 2014 yang besarnya mencapai 88,46%. Selain Pajak Parkir, pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Pajak Reklame, yaitu turun dari sebesar 72,41% pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,31% pada tahun 2015.

Secara keseluruhan dari 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah, ada 7 (tujuh) jenis pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yaitu: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Reklame, (iii) Pajak PJU (Penerangan Jalan Umum), (iv) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (v) Pajak Parkir, (vi) Pajak Air Tanah, dan (vii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11.3

Grafis Laju Pertumbuhan Berbagai Jenis Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 (dalam persen)

Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 6.

5. Matrik Potensi Pajak Daerah

Rumus untuk menghitung potensi pungutan dari berbagai jenis Pajak Daerah dari sisi penggolongan masing-masing jenis Pajak Daerah, apakah termasuk dalam kategori Prima, Potensial, Berkembang atau Terbelakang, digunakan pendekatan Matriks Potensi.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bagian 2, maka suatu pos Pajak Daerah, dapat menempati salah satu dari 4 (empat) kemungkinan sebagai berikut:

- Terbelakang**, Kode 0 0 (baik sumbangan maupun pertumbuhan di bawah rerata);
- Berkembang**, Kode 0 1 (sumbangan di bawah rerata, tetapi tingkat pertumbuhan di atas rerata);
- Potensial**, Kode 1 0: (sumbangan di atas rerata, tetapi tingkat pertumbuhan masih di bawah rerata); dan
- Prima**, Kode 1 1: (baik sumbangan maupun pertumbuhan berada di atas rerata).

Gambaran hasil perhitungan Matriks Potensi dari 10 (sepuluh) jenis pos Pajak Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.7
Matriks Potensi dari Berbagai Jenis Pos Pajak Daerah
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dan 2015

NoJENIS PAJAK		Kode Status 1)		Status Kinerja 2)	
		2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Hotel	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
02.	Restoran	0 1	0 1	Berkembang	Berkembang
03.	Hiburan	0 0	0 1	Terbelakang	Berkembang
04.	Reklame	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
05.	PPJU	1 1	1 0	Prima	Potensial
06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	0 0	0 0	Terbelakang	Terbelakang
07.	Parkir	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
08.	Pajak Air Tanah	0 1	0 0	Berkembang	Terbelakang
09.	BPHTB	1 0	1 1	Potensial	Prima
10.	PBB	1 1	1 0	Prima	Potensial

- Catatan: 1) Kode 0 menunjukkan nilai besaran (kontribusi dan pertumbuhan) yang kurang dari 1 sedang kode 1 menunjukkan besaran yang lebih besar dari 1 dibanding rerata sumbangan dan pertumbuhan Pajak Daerah.
2) Kode 0 0: Terbelakang (baik sumbangan maupun pertumbuhan di bawah rerata); Kode 0 1: Berkembang (pertumbuhan di atas rerata); Kode 1 0: Potensial (sumbangan di atas rerata); dan Kode 1 1: Prima (sumbangan maupun pertumbuhan di atas rerata).

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke-10 jenis Pajak Daerah, hanya ada 3 (tiga) pos Pajak Daerah yang bisa menempati status **Prima**, yaitu: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); dan (iii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Pada tahun 2014, jenis Pajak Daerah yang masuk kategori **Terbelakang**, adalah Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara pada tahun 2015 bertambah banyak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) dan PBB

(Pajak Bumi dan Bangunan), pada tahun 2015 masuk dalam kategori **Potensial**, di mana dari sisi sumbangannya besar namun tingkat pertumbuhannya berada di bawah tingkat pertumbuhan Pajak Daerah. Gambaran selengkapnya lihat pada Tabel 11.7.

6. Trend Pajak Daerah

Sebagaimana yang telah dibahas dalam BAB I, analisis *trend* yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan regresi tunggal/ sederhana dengan variabel terikatnya (*dependent variable*) adalah komponen / pos-pos Pajak Daerah dan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah variabel waktu.

Untuk variabel waktu diberikan kode 1 sampai dengan 3, di mana untuk tahun 2013 = 1; tahun 2014 = 2; dan tahun 2015 = 3. Hasil analisis untuk parameter konstanta (bo) dan intersep/slope/kemiringan (b1) dan parameter lain adalah sebagai berikut:

Tabel 11.8
Parameter Model *Trend* dengan Pendekatan Regresi Tunggal/Sederhana
($Y = b_0 + b_1.X_i + e_i$)

No.	JENIS PAJAK	Konstanta	Intersep	Adj. R ²	t-Test	Signifikansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Hotel 3)	293.89	790.63	97.9%	9.63	6.6%
02.	Restoran 2)	58.25	1,269.02	99.9%	46.19	1.4%
03.	Hiburan	45.23	218.61	92.4%	5.03	12.5%
04.	Reklame	312.41	305.91	91.1%	4.64	13.5%
05.	PPJU Mineral	10,281.88	27,110.31	94.6%	6.03	10.5%
06.	Bukan Logam dan Batuan 1)	420.54	-130.01	100.0%	-270.15	0.2%
07.	Parkir	87.96	66.41	63.7%	2.12	28.0%
08.	Pajak Air Tanah	578.35	499.38	72.0%	2.48	24.4%
09.	BPHTB 3)	6,176.99	8,255.52	98.7%	12.37	5.1%
10.	PBB	13,068.23	11,860.74	80.6%	3.05	20.2%
	Pajak Daerah	23,281.53	50,246.51	97.3%	8.59	7.4%

- Catatan: 1) Model *trend* jenis pajak ini mempunyai tingkat kesalahan 1%, yaitu model *trend* untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2) Model *trend* jenis pajak ini mempunyai tingkat kesalahan 5%, yaitu model *trend* untuk Pajak Restoran
3) Model *trend* jenis pajak ini mempunyai tingkat kesalahan 10%, yaitu model *trend* untuk Pajak Hotel dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Sumber: Dirangkum dari Hasil Pengolahan Data Sekunder (2016)

Dari parameter model tersebut di atas, dapat diproyeksikan pos-pos Pajak Daerah untuk untuk 2016-2020. Proyeksi yang dilakukan berbasis data realisasi dari 10 (sepuluh) jenis / pos Pajak Daerah selama tahun 2013-2015. Hasil proyeksi pos-pos Pajak Daerah untuk tahun 2016-2020; selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Dari Tabel 9 dapat bahwa pos Pajak Daerah yang relatif besar adalah: (i) PPU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Ketiga jenis Pajak Daerah ini masih akan tetap mendominasi perolehan pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar hingga masa-masa mendatang, jika tidak ada reformasi perpajakan secara mendasar.

Jenis pos Pajak Daerah yang relatif besar dan bisa menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Karanganyar setelah ketiga pos pajak di atas adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Selain itu Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak Reklame juga merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah yang cukup besar. Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBL_B) masih memberikan kontribusi yang relatif kecil, bahkan untuk MBL_B hasil proyeksinya negatif yang semata-mata menunjukkan penurunan tingkat pertumbuhan yang semakin besar.

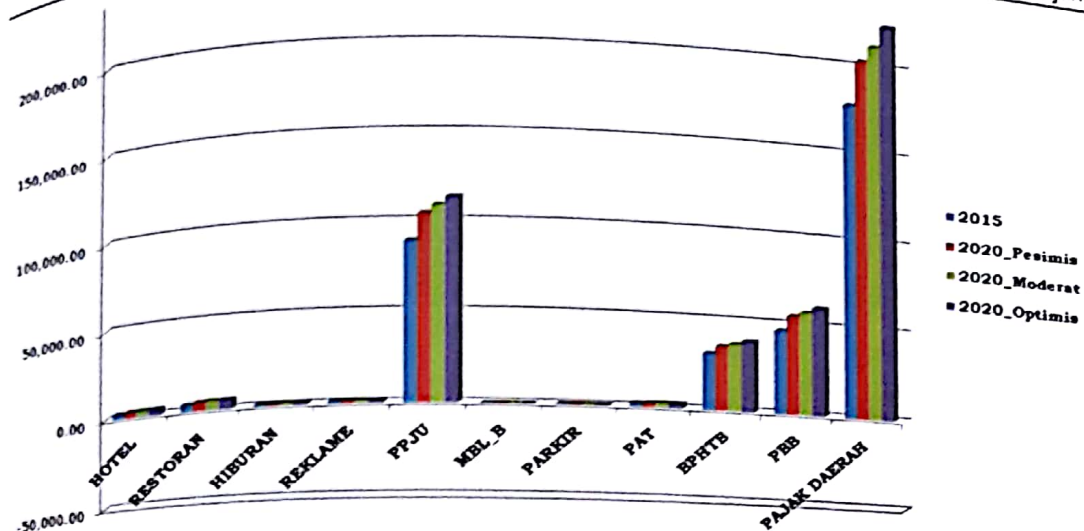
Untuk gambaran hasil proyeksi optimis, moderat dan pesimis, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.9 dan Gambar 11.4. Proyeksi OPTIMIS diperoleh dari model *trend* dengan memberi bobot masing-masing sebesar 3.2 (tahun 2016); sebesar 3.4 (tahun 2017); sebesar 3.6 (tahun 2018); sebesar 3.8 (tahun 2019); dan sebesar 4.0 (tahun 2020). Sementara, model proyeksi MODERAT didapatkan dari hasil proyeksi OPTIMIS dikurangi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun model proyeksi PESIMIS, diperoleh dari hasil proyeksi OPTIMIS dikurangi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%.

Tabel 11.9
Data Realisasi Pos Pajak Daerah (Tahun 2013-2015)
dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah
Tahun 2016-2020 (dalam Rp Juta)

TAHUN	HOTEL	RESTORAN	HIBURAN	REKLA- ME	PPJU	MBI_B	PARKIR	PAI	HPHTB	PBB	PAJAK DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DATA DASAR BASIS PROYEKSI TAHUN 2013-2015											
2013	1,037.12	1,311.41	288.94	580.24	34,795.34	290.80	136.31	961.40	14,817.81	22,685.55	76,904.92
2014	1,969.95	2,628.02	432.28	1,000.40	69,696.17	159.95	256.88	1,809.77	21,917.41	41,276.55	117,020.82
2015	2,618.38	3,849.46	726.16	1,192.06	89,015.96	30.77	269.12	1,960.17	31,328.84	46,407.03	177,397.94
PROYEKSI OPTIMIS POS PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 1)											
2016	2,823.90	4,119.12	744.79	1,291.33	97,034.86	4.49	300.45	2,176.37	32,594.64	51,022.37	184,070.38
2017	2,982.03	4,372.93	788.51	1,352.51	102,456.92	(21.51)	313.73	2,276.25	34,245.74	53,394.52	194,119.68
2018	3,140.15	4,626.73	832.24	1,413.69	107,878.98	(47.51)	327.02	2,376.12	35,896.85	55,766.66	204,168.98
2019	3,298.28	4,880.54	875.96	1,474.87	109,776.70	(73.52)	340.30	2,476.00	37,547.95	58,138.81	214,218.28
2020	3,456.41	5,134.34	919.68	1,536.06	113,301.04	(99.52)	353.58	2,575.88	39,199.05	60,510.96	224,267.59
PROYEKSI MODERAT POS PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 2)											
2016	2,590.14	3,808.27	718.71	1,179.15	88,045.61	30.73	266.11	1,938.40	31,002.90	45,896.81	175,557.24
2017	2,794.08	4,075.40	736.91	1,277.80	96,010.29	4.71	297.32	2,153.61	32,252.18	50,488.42	182,125.18
2018	2,950.63	4,326.66	780.19	1,338.37	101,378.13	(21.03)	310.46	2,252.49	33,886.77	52,836.85	192,077.99
2019	3,107.17	4,577.93	823.48	1,398.94	106,781.21	(46.78)	323.61	2,351.36	35,521.37	55,185.28	202,026.80
2020	3,263.72	4,829.20	866.76	1,459.51	108,643.69	(72.52)	336.76	2,450.24	37,155.96	57,533.70	211,975.61
PROYEKSI PESIMIS POS PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020 3)											
2016	2,477.18	3,643.50	688.92	1,127.50	84,164.21	30.55	254.09	1,851.35	29,699.11	43,855.91	168,194.42
2017	2,674.80	3,900.48	705.37	1,223.70	91,912.01	5.57	284.77	2,062.56	30,882.35	48,352.64	174,364.39
2018	2,825.02	4,141.59	746.90	1,281.83	97,962.97	(19.13)	297.38	2,157.44	32,450.90	50,606.18	183,911.23
2019	2,975.24	4,382.71	788.44	1,339.95	102,390.14	(43.84)	310.00	2,252.32	34,919.45	52,859.72	193,458.07
2020	3,125.46	4,623.82	829.98	1,398.07	104,111.65	(68.54)	322.62	2,347.21	35,588.00	55,113.26	203,004.90

- Catatan:
- 1) Indeks proyeksi OPTIMIS adalah sebesar 3.2 (tahun 2016); sebesar 3.4 (tahun 2017); sebesar 3.6 (tahun 2018); sebesar 3.8 (tahun 2019); dan sebesar 4.0 (tahun 2020).
 - 2) Indeks proyeksi MODERAT adalah hasil proyeksi OPTIMIS dikurang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%.
 - 3) Indeks proyeksi PESIMIS adalah hasil proyeksi OPTIMIS dikurang Dengan tingkat pertumbuhan 5%.

Sumber: Dirangkum dari Hasil Pengolahan Data Sekunder (2016)



Gambar 11.4

Grafik Data Realisasi Pos Pajak Daerah Tahun 2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 dan Hasil Proyeksi Pos Pajak Daerah Tahun 2016-2020 (dalam Rp Juta)

Catatan: (i) PPJU: Pajak Penerangan Jalan Umum, (ii) MBL_B: Mineral Bukan Logam dan Batuan, (iii) PAT: Pajak Air Tanah, (iv) BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta (v) PBB: Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Hasil pengolahan dari Tabel 4.7.

7. Simpulan

Dalam kajian ini semua pos Pajak Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dikaji (kecuali Pajak Sarang Burung Walet, yang di Kabupaten Karanganyar tidak dipungut). Keseluruhan Pajak Daerah yang dikaji adalah: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU); (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan; dan (x) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pos-pos dalam Pajak Daerah yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap perolehan Pajak Daerah adalah: (i) PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Ketiga jenis Pajak Daerah ini masih akan tetap mendominasi perolehan pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar hingga masa-masa mendatang.

Selama kurun waktu 2013-2015 tidak ada satupun jenis Pajak Daerah yang mengalami kenaikan kontribusi yang kecenderungan atau trennya semakin meningkat, tetapi naik turun selama kurun waktu tersebut. Selain Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jenis pajak yang

kontribusinya semakin menurun adalah Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yaitu dari sebesar 19,27% pada tahun 2013; turun menjadi sebesar 18,73% pada tahun 2014; serta turun lagi menjadi sekitar 17,66% pada tahun 2015.

Secara keseluruhan dari 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah, ada 7 (tujuh) jenis pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yaitu: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Reklame, (iii) Pajak PJU (Penerangan Jalan Umum), (iv) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (v) Pajak Parkir, (vi) Pajak Air Tanah, dan (vii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sementara yang mengalami peningkatan pertumbuhan ada 3 (tiga) yaitu: (i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Hiburan, dan (iii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Secara keseluruhan pertumbuhan untuk pos Pajak Daerah pada tahun 2015 (sebesar 28,94%) lebih rendah dibanding dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 (sebesar 52,16%). Sementara untuk pos Pajak Parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2015, yaitu sebesar -13,38%; dibanding dengan tahun 2014 yang besarnya mencapai 88,46%. Selain Pajak Parkir, pos Pajak Daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Pajak Reklame, yaitu turun dari sebesar 72,41% pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,31% pada tahun 2015.

Pajak Daerah yang menempati status **Prima**, yaitu: (i) PPU (Pajak Penerangan Jalan Umum), (ii) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); dan (iii) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). PPU (Pajak Penerangan Jalan Umum) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pada tahun 2015 masuk dalam kategori **Potensial**, di mana daris isi sumbangannya besar namun tingkat pertumbuhannya berada di bawah tingkat pertumbuhan Pajak Daerah. Di lain pihak, jenis Pajak Daerah yang masuk kategori **Terbelakang**, adalah Pajak Hiburan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara pada tahun 2015 bertambah banyak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

8. Rekomendasi

Upaya peningkatan kinerja Pajak Daerah untuk masing-masing pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar dari hasil analisis realiasi pos-pos Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel pada tahun 2013 masuk dalam kategori pajak yang mempunyai Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) dari pos-pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar paling rendah, yaitu sebesar 125,71%. Artinya, dibanding dengan pos-pos pajak lainnya, Pajak Hotel mempunyai tingkat pencapaian realisasi dibanding target yang relatif rendah. Kondisi yang demikian perlu dicari akan permasalahannya, khususnya jika dikaitkan dengan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar yang seharusnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masih rendahnya rerata kontribusi dari pos Pajak Hotel ini, yang selama kurun waktu 2013-2015 baru mencapai 1,50%. Status kinerja dari pos Pajak Hotel ini turun dari **Berkembang** menjadi **Terbelakang**. Hal ini sebabkan oleh penurunan pertumbuhan pos Pajak Hotel dari sebesar 89,94% pada tahun 2014, turun menjadi sebesar 23,74% pada tahun 2015.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran mempunyai besaran Rasio Pengumpulan (CR: *Collection Ratio*) yang paling tinggi, yaitu rata-rata selama 2013-2015 sebesar 368,02%. Hal ini mempunyai implikasi bahwa dibanding dengan target yang ditetapkan, capaian realisasi Pajak Restoran mempunyai tingkat capaian realisasi yang paling besar. Artinya jenis pajak ini pada masa-masa mendatang dapat dikategorikan pajak yang mempunyai prospek peningkatan yang sangat baik dibanding dengan jenis Pajak Daerah lainnya, walaupun untuk saat ini nilainya masih kalah jauh dibanding dengan perolehan pajak dari pos PPJU, PBB dan BPHTB. Di samping itu, Pajak Restoran juga mempunyai rerata pertumbuhan yang paling tinggi, dengan tingkat pertumbuhan mencapai angka 104%. Pertumbuhan Pajak Restoran yang tinggi dicapai pada tahun 2015, yaitu sebesar 108,86%. Oleh karenanya jenis pajak ini selain mempunyai CR yang tinggi juga mempunyai daya tumbuh yang relatif besar.

c) Pajak Hiburan

Pada tahun 2014, Pajak Hiburan masuk dalam kategori **Terbelakang**, sedang pada tahun 2015 masuk kategori **Berkembang**. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis pajak ini mengalami transformasi ke arah yang lebih baik; khususnya jika dilihat dari sisi pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan dari jenis pajak ini, mengalami peningkatan dari sebesar 49,61% pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 102% pada tahun 2015. Walaupun secara kontribusinya masih kurang dari 1% dari keseluruhan Pajak Daerah. Ke depan penggalan Pajak Hiburan yang berbasis pada potensi yang sebenarnya perlu dilakukan dengan baik.

d) **Pajak Reklame**

Pajak Reklame memberikan sumbangan ke Pajak Daerah kurang dari 1%. Di samping itu, selama kurun waktu 2013-2015; jenis Pajak Reklame juga mengalami penurunan tingkat pertumbuhannya, yaitu dari sebesar 72,41% pada tahun 2014, turun menjadi sebesar 4,31% pada tahun 2015. Oleh karenanya status kinerjanya mengalami penurunan dari kategori **Berkembang** ke kategori **Terbelakang**. Perolehan dari Pajak Reklame idealnya akan cenderung semakin besar seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat. Oleh karenanya berbagai usaha yang diarahkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat sangat diperlukan untuk memperbesar perolehan pendapatan dari pos Pajak Reklame pada masa-masa mendatang.

e) **Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)**

PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) memberikan kontribusi yang paling besar terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Karangayar, di mana secara rata-rata selama kurun waktu 2013-2015 memberikan kontribusi sebesar 51,66% atau hampir separuh dari total Pajak Daerah. Status kinerja dari pos pajak ini turun dari kondisi **Prima** menjadi **Potensial**. Artinya walupun mempunyai sumbangan besar, tetapi daya tumbuhnya semakin menurun. PPJU mempunyai peran besar bagi perolehan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar, sehingga upaya mempertahankan jenis pajak masih menjadi bagian yang penting dalam tatalaksana perpajakan di Kabupaten Karanganyar.

f) **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan kurang dari 1% terhadap Pajak Daerah. Di samping itu, jenis pajak ini cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013-2015. Oleh karenanya tingkat pertumbuhan dari jenis pajak ini terus mengalami pertumbuhan yang negatip. Tingkat pertumbuhan dari pos pajak ini terus mengalami penurunan dari sebesar -45,00% pada tahun 2014, menurun lagi menjadi -93,60% pada tahun 2015; sehingga secara rerata mempunyai pertumbuhan yang negatip sebesar -69,30% selama tahun 2014-2015. Ke depan harus dicari permasalahan yang terjadi terhadap pos pajak ini, apakah masih potensial atau memang kurang optimal dalam usaha penggaliannya.

g) **Pajak Parkir**

Pajak Parkir, seperti halnya dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, memberikan sumbangan kurang dari 1% terhadap Pajak Daerah. Di samping itu, pos Pajak Parkir juga mengalami pertumbuhan yang negatip pada tahun 2015, yaitu sebesar -13,38%; dibanding dengan

tahun 2014 yang besarnya mencapai 88,46%. Sebagaimana Pajak Hotel, Pajak parkir ini juga mengalami penurunan status kinerjanya dari **Berkembang** (tahun 2014) menjadi **Terbelakang** (tahun 2015). Hal ini terjadi karena penurunan tingkat pertumbuhan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Optimalisasi terhadap Pajak Parkir perlu dilakukan, agar tingkat kontribusi maupun daya tumbuhnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

h) **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah, sebagaimana Pajak Hotel dan Pajak Parkir; mengalami penurunan status kinerjanya dari **Berkembang** (tahun 2014) menjadi **Terbelakang** (tahun 2015). Hal ini terjadi karena penurunan tingkat pertumbuhan dari sebesar 88,24% pada tahun 2014 menjadi sebesar 16,44% pada tahun 2015. Pajak Air Tanah memberikan kontribusi ke Pajak Daerah selama kurun waktu 2013-2015 secara rata-rata sebesar 1,30%. Optimalisasi terhadap Pajak Air Tanah, sebagaimana juga Pajak Parkir perlu dilakukan, agar tingkat kontribusi maupun daya tumbuhnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

i) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) memberikan sumbangan secara rata-rata selama kurun waktu 2013-2015 sebesar 18,55%. Besaran sumbangan ini menempati urutan ke-3 setelah PPU dan PBB. BPHTB ini walaupun relatif besar sumbangannya, namun mempunyai kecenderungan pertumbuhan yang semakin menurun; yaitu dari sebesar 19,27% pada tahun 2013; turun menjadi sebesar 18,73% pada tahun 2014; serta turun lagi menjadi sekitar 17,66% pada tahun 2015. Upaya untuk peningkatan BPHTB harus terus dicari akar permasalahannya, sehingga keberadaannya diharapkan selain memberikan kontribusi yang besar juga mempunyai daya tumbuh yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

j) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan**

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Karanganyar secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 30,31%. Artinya keberadaan jenis pajak ini masih sangat penting untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang, karena kontribusinya menempati urutan ke-2 setelah PPU. Pembaharuan pendataan basis pajak untuk PBB perlu terus dilakukan, khususnya di kompleks perumahan karena banyak model bangunan dan nilai objek pajak saat ini masih belum banyak yang mengalami perubahan dibanding pada masa awal kepemilikan oleh pihak pertama. Banyak lokasi yang sistem penamaan jalannya sudah tidak sesuai dengan kondisi nama jalan yang ada pada saat ini. Kondisi tersebut jelas menyulitkan petugas di

tingkat desa ketika hendak menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) kepada pemilik yang sekarang

Pengukuran prestasi kerja dalam penerimaan Pajak Daerah masih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah dari target penerimaan Pajak Daerah, dan bukan dari rasio cakupan (*coverage ratio*), yang merupakan rasio dari realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap potensi yang benar-benar ada dan dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar.

Hasil kajian ini, diharapkan bisa dikembangkan ke jenis pos Retribusi Daerah dan juga pos-pos yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis retribusi dan juga pos-pos lain yang termasuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

REFERENSI

- Ahmad, Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Prakosa, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Badan Pusat Statistik Kab. Karanganyar. 2014. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2013*. Karanganyar: BPS.
- _____. 2015. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2014*. Karanganyar: BPS.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar. (2016). *Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015*. Karanganyar: DPKKAD.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kaputra, Iswan. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah
dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sidik, Macfud. 2002. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta:
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Simanjuntak, Robert. 2002. *Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi
Fiskal di Indonesia*, dalam 80 Tahun Mohamad Sadli: Ekonomi
Indonesia pada Era Politik Baru. Jakarta: Gramdia Pustaka.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

_____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN 1

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 (RP JUTA)

NO.	JENIS PAJAK	REALISASI PEROLEHAN PAJAK DAERAH												TOTAL	
		TARGET	JANU- ARI	FEBRU- ARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS- TUS	SEPTEM- BER	OKTO- BER	NOPEM- BER		DESEM- BER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
01.	Hotel	823	100	84	39	89	75	82	131	36	87	123	44	145	1.862
02.	Restoran	475	84	71	58	101	85	100	133	42	84	162	75	353	1.823
03.	Hiburan	110	23	27	9	43	21	16	28	14	20	41	22	30	404
04.	Reklame	376	30	53	53	76	36	62	57	51	51	33	26	52	956
05.	PPJU	25,226	2,628	2,638	2,781	2,605	2,821	2,911	2,999	2,970	3,188	2,823	3,122	3,338	60,021
06.	Mineral Bukan Logam Dan Batuan	110	11	3	4	4	11	11	13	12	21	50	51	102	403
07.	Parkir	55	6	7	6	11	8	10	15	14	18	15	12	14	191
08.	Pajak Air Tanah	750	73	98	74	57	104	40	105	58	101	84	83	88	1.717
09.	BPHB	7,250	134	827	1,606	682	918	729	916	681	1,561	1,921	809	4,094	22,129
10.	PHB	16,000	61	181	324	1,103	2,777	2,284	2,536	1,731	9,021	1,722	505	440	38,686
	Pajak Daerah	51,177	3,151	3,989	4,925	4,772	6,856	6,245	6,933	5,611	14,152	6,974	4,751	6,656	128,192

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

LAMPIRAN 2

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 (RP. JUTA)

NO.	JENIS PAJAK	REALISASI PEROLEHAN PAJAK DAERAH												TOTAL	
		TARGET	JANU- ARI	FEBRU- ARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS- TUS	SEPTEM- BER	OKTO- BER	NOPEM- BER		DESEM- BER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
01.	Hotel	855	57	88	66	65	89	79	118	49	96	107	189	113	1,115
02.	Restoran	540	33	86	65	66	74	143	232	113	156	205	361	553	2,088
03.	Hiburan	150	12	24	12	23	21	17	50	14	28	20	34	27	282
04.	Reklame	420	71	24	70	29	45	17	95	34	50	64	51	31	580
05.	PPJU	27,650	3,256	3,283	3,275	3,100	3,377	3,330	3,493	3,422	3,405	3,692	4,104	4,309	42,046
06.	Mineral Bukan Logam Dan Batuan	125	3	2	-	5	-	-	-	-	-	2	-	23	35
07.	Parkir	80	12	13	12	25	12	14	16	22	13	11	13	13	177
08.	Pajak Air Tanah	775	87	75	98	89	74	67	74	113	95	84	47	130	1,035
09.	BPHB	7,250	339	1,595	628	1,418	1,178	1,597	1,002	887	1,407	1,172	1,133	2,312	14,667
10.	PHB	17,150	333	459	2,193	2,314	2,148	2,110	1,193	2,637	8,707	1,078	532	421	24,127
	Pajak Daerah	54,995	4,202	5,651	6,418	7,135	7,019	7,375	6,273	7,291	13,958	6,434	6,463	7,933	86,152

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

LAMPIRAN 3

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 (RP. JUTA)

REALISASI PEROLEHAN PAJAK DAERAH															
NO.	JENIS PAJAK	TARGET	JANU- ARI	FEBRU- ARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS- TUS	SEPTEM- BER	OKTO- BER	NOPEM- BER	DESEM- BER	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
01.	Hotel	1,058	100	40	84	134	51	90	82	118	175	109	271	306	1,560
02.	Restoran	1,128	98	79	104	222	180	185	237	178	203	209	292	736	2,722
03.	Hiburan	304	51	17	33	21	11	30	25	38	51	10	50	83	422
04.	Reklame	438	77	42	56	61	67	42	86	70	121	37	52	44	754
05.	PPJU	35,000	4,553	4,552	4,467	4,102	4,413	4,425	4,677	4,647	3,978	4,719	4,688	4,794	54,016
	Mineral Bukan Logam Dan Batuan		8	0	11	5	1	1	0	0	2	0	1	0	23
07.	Parkir	69	13	12	24	24	12	16	15	26	13	13	15	18	200
08.	Pajak Air Tanah	902	86	80	67	89	83	114	58	102	104	80	67	128	1,058
09.	BPHTB	11,000	456	3,007	1,412	892	708	2,055	690	984	1,272	1,888	3,768	3,196	20,329
10.	PBB	21,000	630	1,203	2,918	3,573	2,350	1,926	1,285	2,805	6,825	678	616	597	25,407
	Pajak Daerah	70,908	6,065	9,042	9,170	9,120	7,876	8,884	7,154	8,969	12,742	7,743	9,819	9,905	106,490

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karanganyar. (2016). Data diolah.

MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL

Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan

Menumbuhkan ekonomi lokal membutuhkan peran pelaku usaha (*entrepreneurship*), pemerintah, dan lingkungan usaha (pasar). Pelaku usaha yang memiliki kreativitas untuk memberi nilai tambah terhadap produk belum tentu akan mampu bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar. Pemerintah di satu sisi memiliki keterbatasan dalam penganggaran untuk membantu pengembangan ekonomi lokal. Daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah dipandang kurang *seksi* menjadi produk unggulan daerah, meski sejatinya pengembangan ekonomi lokal mampu secara langsung pemeratakan kue pembangunan melalui terserapnya tenaga kerja lokal dan bahan baku lokal. Lingkungan usaha juga kadang tidak memberikan keuntungan untuk pengembangan ekonomi lokal, misalnya tuntutan sertifikasi produk.

Peluang dan tantangan pengembangan ekonomi lokal membutuhkan kerja sama tiga pilar. Target pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai amanat *sustainable development goals* salah satunya dengan mewujudkan kerja sama tiga pilar ini. Ekonomi lokal yang berkembang mencerminkan keterlibatan masyarakat lokal (*inclusive*), penggunaan sumber daya yang efisien (*efficiency*), dan ramah terhadap lingkungan.



Sebelas Maret University Press
Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta 57126
Telp. (0271) 646994 Psw.341
www.unspress.uns.ac.id

